

BAB I

PENDAHULUAN

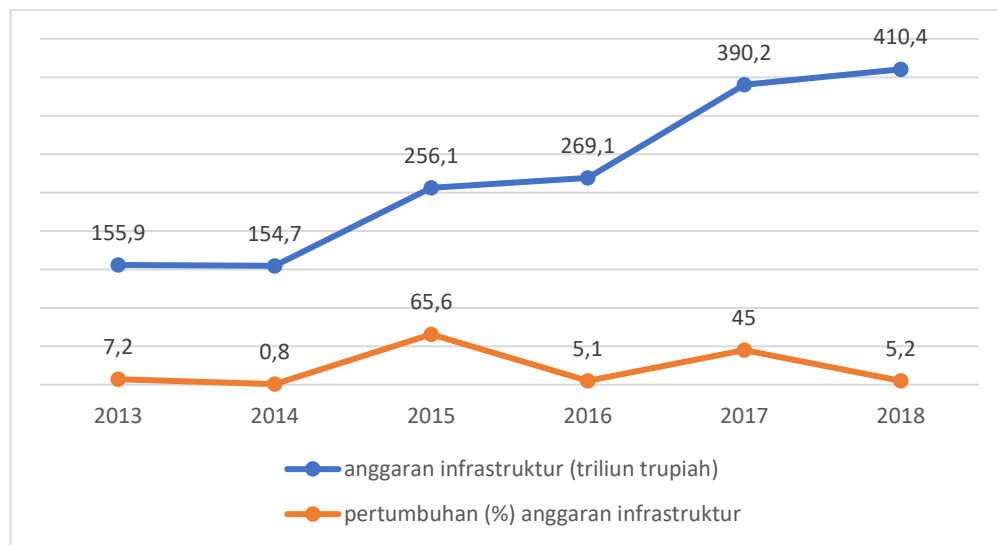
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita dari penduduk dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil ketika pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut tidak menjadi penyebab naiknya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi jika sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah dan pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, jika semakin besar selisih perbedaan pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu menunjukkan bahwa semakin besar juga ketimpangan pendapatan di negara tersebut. Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu, jika nilai indeks gini nol artinya tidak ada ketimpangan atau dapat dikatakan pemerataan sempurna sedangkan nilai satu artinya terdapat ketimpangan sempurna. (Tampubolon N., 2013)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun disisi lain pertumbuhan ekonomi tidak selalu bisa menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat, pembangunan yang hanya berfokus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi akan berpotensi untuk menciptakan adanya ketidakadilan yang berujung pada ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, antar kelompok, ataupun antar daerah (Amrillah, 2013)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pertumbuhan yang sesuai dengan disertai pemerataan dibutuhkan pendekatan yang tepat. Salah satunya yaitu melalui pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur memiliki peran yang penting dalam meningkatkan investasi dan juga pemerataan dari hasil pembangunan. Dalam kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi maka diperlukan sarana infrastruktur yang memadai, infrastruktur juga menjadi penunjang dalam terselenggaranya suatu proses pembangunan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbaikan pada sektor infrastruktur dapat mendorong minat investasi asing dan domestik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia salah satunya karena meningkatnya perhatian pemerintah terhadap investasi infrastruktur. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi indikator untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan dan dapat menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang (Lestari, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Vina M. (2019) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. Infrastruktur memiliki peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan kemakmuran. Selain itu infrastruktur juga digunakan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan, infrastruktur juga sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses pembangunan sumber daya manusia (SDM), di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur selama ini lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur 2013-2018

Sumber: Informasi APBN 2018 (data-apbn.kemenkeu.go.id)

Pada masa pemerintahan saat ini pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, hal tersebut di dukung dengan semakin meningkatnya anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun. Seperti yang dapat dilihat dalam grafik di atas, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran infrastruktur terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun-tahun selanjutnya dimana pada tahun 2018 anggaran untuk infrastruktur mencapai nilai sebesar 410,4 triliun rupiah jumlah ini meningkat sebesar 5,2% dari tahun sebelumnya yaitu 390,2 triliun rupiah pada tahun 2017.

World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga komponen utama, yaitu: 1) Infrastruktur ekonomi yang meliputi *public utilities* (tenaga listrik, telekomunikasi, air, gas, dan sanitasi), *public work* (jalan, bendungan, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, bandara, dan lain-lain); 2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi; 3)

Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

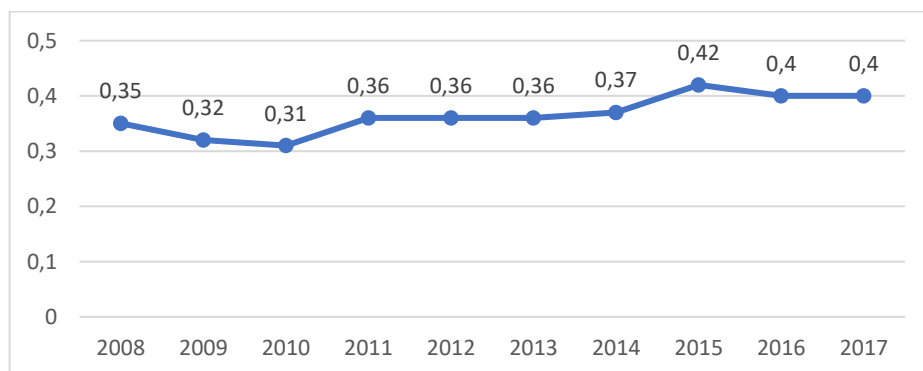
Infrastruktur ekonomi seperti listrik dan air dapat menjadi modal yang dimanfaatkan oleh tenaga kerja dalam proses produksi. Penggunaan air bersih oleh rumah tangga juga menjadi faktor penting yang berperan untuk menjaga kesehatan tenaga kerja, oleh karena itu air bersih secara tidak langsung berperan terhadap perekonomian melalui peningkatan kesehatan tenaga kerja. tenaga kerja yang sehat mampu bekerja dengan baik, sehingga nantinya juga dapat meningkatkan produktivitas. Infrastruktur ekonomi lainnya seperti jalan juga memiliki peran yang tidak kalah penting karena dapat menjadi sarana penunjang bagi kelancaran kegiatan atau aktivitas ekonomi. Infrastruktur sosial dapat meliputi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pendidikan bagi para tenaga kerja dapat meningkatkan keahlian mereka dalam proses produksi nantinya. Sedangkan infrastruktur kesehatan dapat membantu tenaga kerja dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang dapat menghambat jalannya kegiatan produksi mereka. Oleh karena itu adanya infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di Indonesia, provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang maju hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari ajang penghargaan nasional Indonesia Attractiveness Award 2017.

Tabel 1.1 Kota Terbaik Untuk Kategori Infrastruktur

No	Nama Kota	Index Infrastruktur
1	Kota Surabaya	99.66
2	Kota Bandung	99.21
3	Kota Semarang	96.46

Sumber: Indonesia Attractiveness Award 2017

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kota Surabaya menjadi kota dengan infratsruktur terbaik di Indonesia. Selain itu salah satu infrastruktur terbaik yang dimiliki di Provinsi Jawa Timur yaitu adanya jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan dua pulau yaitu Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan panjang 5.438 m, jembatan ini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia saat ini sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan infrastruktur yang cukup memadai di Indonesia. Selain infrastruktur yang baik, Provinsi Jawa Timur juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 5,50% nilai ini naik 0,04% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,46% di tahun 2017. Adanya pembangunan infrastruktur yang semakin membaik dari tahun ke tahun diharapkan nantinya akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga kesejahteraan masyarakat, dimana selain pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tingkat ketimpangan juga mengalami penurunan.



Gambar 1.2 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017

Sumber: BPS Jawa Timur

Dari data Indeks Gini Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017 yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa nilai gini rasio di Jawa Timur secara umum mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2008 sebesar 0,35 menjadi 0,4 di tahun 2017. Artinya secara umum dari tahun 2008 sampai tahun 2017 ketimpangan ekonomi di Jawa Timur semakin tinggi, meskipun Provinsi Jawa Timur memiliki Infrastruktur yang cukup memadai dan juga nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga, namun hal tersebut tetap tidak lepas dari adanya permasalahan ketimpangan ekonomi di Jawa Timur.

Beberapa bukti empiris mengenai keterkaitan hubungan antara infrastruktur terhadap ketimpangan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Na'imah, 2016) mengenai analisis pengaruh infrastruktur dan dana alokasi umum terhadap ketimpangan pendapatan regional kabupaten atau kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan regional kabupaten atau kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penelitian dari (Tampubolon, 2013) mengenai pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur sekolah dan air berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, sedangkan ketersediaan infrastruktur listrik, panjang jalan, dan ranjang rumah sakit memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia pada periode tahun 2007-2011. Penelitian Sibarani (2002) menyatakan bahwa kontribusi infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, menyimpulkan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan per kapita.

Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut penelitian dari (Pamungkas 2009) menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan listrik, irigasi serta penyediaan air bersih, dan lain sebagainya memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap perkembangan suatu wilayah. Selain itu Prasetyo (2013) menggunakan infrastruktur ekonomi dan sosial seperti jalan, sekolah menengah umum, fasilitas kesehatan, dan sanitasi rumah tangga untuk menilai hubungan antara infrastruktur dengan ketidakmerataan di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dibutuhkan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara ketersediaan infrastruktur dan ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini mencakup seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur agar nantinya dapat memperoleh hasil yang lebih spesifik dan mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2017 ?
2. Bagaimana ketersediaan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2008-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2008-2017.

2. Menganalisis ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur pada tahun 2008-2017.
3. Menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008-2017.

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik, meingkatkan wawasan pengetahuan mengenai pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi di Jawa Timur.
2. Manfaat praktis, membrikan sumbangsih pemikiran kepada setiap pemangku kebijakan sehingga dapat memberikan kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan di Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Manfaat teoritis dan ilmiah, diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya